

**TINJAUAN ASAS OTONOMI TERHADAP SENTRALISASI PENERBITAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MELALUI UU NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (SH) Pada Program
Studi Hukum Tata Negara

OLEH :

**LA ODE RAHMAT FAGIL
NIM: 19020103033**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : iaikendari@yahoo.co.id website : <http://iaikendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL : TINJAUAN ASAS OTONOMI TERHADAP
SENTRALISASI PENERBITAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MELALUI UU NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

NAMA : LA ODE RAHMAT FAGIL

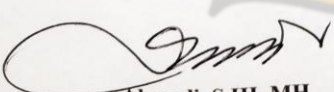
NIM : 19020103033

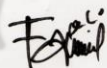
Draf skripsi penelitian ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18/9/2023 untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi.

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmadi, S.HI, MH
NIP.197802192003121003


Fatihani Baso M.H
NIP.199410172019032018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0431) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "TINJAUAN ASAS OTONOMI TERHADAP SENTRALISASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MELALUI UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA" yang ditulis oleh LA ODE RAHMAT FAGIL NIM. 19020103033 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H).

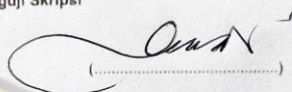
Dewan Penguji Skripsi

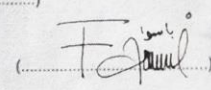
Ketua : Ahmadi S. HI, M.H

Sekretaris : Fatihani Baso M.H.

Anggota1 : Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H

Anggota2 : Muhammad Iqbal Lc, MHI


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



Kendari, 05 Desember 2023
L. Ode Rahmat, S.H., M.H.
NIP. 190203231998031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dibawa bimbingan Bapak Ahmadi, S.HI., M.H. dan Ibu Fatihani Baso, M.H. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 10 Januari 2024

Penyusun,



La Ode Rahmat Fagil

NIM. 19020103033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Ode Rahmat Fagil
NIM : 19020103033
Program Studi : HukumTata Negara
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Skripsi


Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari hak **Bebas Royalti nonesklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Melalui UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 10 Januari 2024
Penyusun,



La Ode Rahmat Fagil
NIM. 19020103033

ABSTRAK

LA ODE RAHMAT FAGIL. NIM. 19020103033. “Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di Bimbing Oleh: Ahmadi, S.HI., M.H., dan Fatihani Baso, M.H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berlakunya undang-undang terbaru tentang pertambangan yakni UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menerapkan sistem sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, yakni **pertama**, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU PNo. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan **kedua**, untuk mengetahui bagaimana dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menggambarkan, **pertama**, Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah kehilangan kewenangan dalam mengatur sektor pertambangan. Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki dampak lingkungan yang sangat merusak. Dengan demikian, penting untuk melakukan desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan dengan dijalankan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan mempertimbangkan kekhususan daerah. Otonomi yang luas tidak berarti bahwa pemerintah daerah bebas bertindak sesuai keinginan atau merdeka sepenuhnya. Prinsip negara kesatuan tetap berlaku, sehingga pemerintah daerah tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangannya. **Kedua**, Dampak dari pengaturan sentralisasi pertambangan adalah hilangnya kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan pertambangan mineral dan batubara dan pemerintah daerah mengalami distorsi pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan dan kurangnya pendapatan daerah.

Kata Kunci : Sentralisasi, Pertambangan, Otonomi Daerah

ABSTRAK

LA ODE RAHMAT FAGIL. NIM. 19020103033. "Review of the Principles of Autonomy Against the Centralization of the Issuance of Mining Business Permits through Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. Guided By: Ahmadi, S.HI., M.H., and Fatihani Baso, M.H.

This research is motivated by the enactment of the latest law on mining, namely Law no. 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which implements a centralized system in the management of mineral and coal mining which eliminates the authority of regional governments. There are two objectives in this research, namely first, to find out how the Autonomy Principle Review of the Centralization of Mining Business Permit Issuance through Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, and secondly, to find out the impact of central government regulations on the issuance of mining business permits by the central government on the implementation of regional autonomy. The type of research used in this research is normative research. This research was carried out using two approaches, namely the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach.

The results of this research illustrate, first, with the enactment of Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, local governments lose their authority to regulate the mining sector. Mineral and coal natural resources are types of resources that cannot be renewed and have very destructive environmental impacts. Thus, it is important to decentralize authority to regions to manage and supervise mining activities in the spirit of the broadest possible autonomy. Providing broad autonomy to regions aims to accelerate community welfare and increase competitiveness, by paying attention to and complying with the principles of democracy, justice, equality, and taking into account regional specificities. Extensive autonomy does not mean that regional governments are free to act as they wish or are completely independent. The principle of a unitary state remains in effect, so that regional governments remain accountable to the central government in carrying out their authority. Second, the impact of centralized mining regulations is the loss of regional government authority over the control of mineral and coal mining and regional governments experience distorted supervision of mining management and lack of regional income.

Keywords: Centralization, Mining, Regional Autonomy

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terkirim dan tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya bagi penulis karena telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Peneliti menyadari bahwa dibalik keberhasilan penulisan penelitian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan dorongan berbagai pihak. Maka sudah sepatutnya peneliti mengucapkan banyak terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda La Ode Naona dan Ibunda Wa Mari atas doa, dukungan, dan bantuan yang begitu luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa pula peneliti juga mengucapkan terimah kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Husain Insawan, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kendari.
2. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kendari.

3. Bapak Finsa Adhi Pratama, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmadi, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fatihani Baso, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini.
5. Aris Nur Qadar Ar-Razak, SHI., MHI., MH., Selaku Dosen penguji I dan H. Muhammad Iqbal Lc, M.HI., Selaku Dosen penguji II.
6. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kepada saudara saya Indri, Lisa dan Aisa, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.
8. Teman seperjuangan HTN 019 lebih khususnya kepada teman-teman HTN A, yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S1.
9. Teman-teman Penguyuban FORMASI Kendari, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dalam penyusunan, maka dari itu peneliti sangat membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Kendari, 10 Januari 2024
Penulis


La Ode Rahmat Fagil
Nim: 19020103033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Relevan	11
2.2 Kajian Teori	17
2.2.1 Konsep Negara Kesatuan	17
2.2.2 Pemerintahan Daerah	19
2.2.3 Asas Otonomi.....	20
2.2.4 Urusan Pemerintahan	24
2.2.5 Desentralisasi	28
2.2.6 Izin Usaha Pertambangan	32
2.2.7 Kerangka Teori.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Waktu Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Indonesia Dalam Kerangka Negara Kesatuan.....	40
4.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah	41
4.2.1 Desentralisasi	41
4.2.2 Dekosentrasi.....	45
4.2.3 Tugas Pembantuan	48
4.3 Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	51
4.4 Dampak Pengaturan Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah	61
4.4.1 Hilangnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara	67
4.4.2 Pemerintah Daerah Mengalami Distorsi Pengawasan Terhadap pengelolaan Pertambangan.....	71
4.4.3 Berkurangnya Pendapatan Daerah.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84